

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Askin, H. Mohammad. 2023. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddique, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajagrafindo Perkasa.
- Asshiddique, Jimly. 2009. *Komentaris atas UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Garner, Bryan. A. 2004. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'Matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, Ni'Matul. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ilmar, Aminuddin. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media
- Ismatullah, H. Dedi. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Junaedi Karso, A. 2021. *Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Manan, Bagir. 1990. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Bandung: Disertasi Universitas Padjadjaran.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Minarno, Nur Basuki. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Mukti, Fajar, dan Yulianto, Ahmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugraha, Setya. Maulina, R. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- Ranawijaya, Usep. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Riyanto, Astim. 2010. *Teori Negara Kesatuan*. Bandung: Yapemdo.
- Safudin, Endrik. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Pt Kencana Prenadamedia Group.
- Sihombing, Eka. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Setara Press.
- Sihombing, Eka. dan Hadita, Cynthia. 2022. *Penelitian Hukum*; Malang: Setara Press.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanto, Nur. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yusa, I Gede. 2016. *Hukum Tata Negara*. Setara Press. Malang.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

C. Jurnal

Nasution, Sutan Rais Aminullah. dan Sembiring, Amsali Syahputra. "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1.1 (2022): 140-153, available from; (<https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8320>)
Silitonga, Marudut Parulian. dan Ani Wijayati. 2024. "Kewenangan MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara." available from; (<https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/304>) (2024): 92-99.
Suhaimi, E. & Yasin, M. 2022. "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(1), 55-65, available from; (<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/jhttp/article/view/81>)

D. Artikel

Muhammad Aulia Rahman. 2023. "Lukas Enembe Ditahan, DPR Minta Plt Gubernur Papua Segera Ditentukan". Beritasatu.com. Diakses dari; (<https://www.beritasatu.com/news/1020977/lukas-enembe-ditahan-dpr-minta-plt-gubernur-papua-segera-ditentukan>), diakses tanggal 6 Januari 2025

- CNN Indonesia.com. 2021. "INFOGRAFIS: Kepala Daerah Terjerat Korupsi di Era Jokowi". Diakses dari; (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302055837-15-612441/infografis-kepala-daerah-terjerat-korupsi-di-era-jokowi>), diakses tanggal 8 Januari 2025
- Dwi Hadya Jayani. 2019. "Sejak 2004 hingga 2019, Terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi". Databoks.katadata.co.id. Diakses dari; (<https://databoks.katadata.co.id/ekonomimakro/statistik/8c2db07185ed474/sejak-2004-hingga-2019-terdapat-124-kepala-daerah-terjerat-korupsi>), diakses tanggal 8 Januari 2025
- Bayu Galih. 2022. "[Kabar Data] Mengurai Akar Masalah Korupsi Kepala Daerah". Kompas.com. Diakses dari; (<https://rri.co.id/hukum/120620/kaleidoskop-daftar-kepala-daerah-di-ott-kpk-2022>), diakses tanggal 8 Januari 2025
- Liputan6.com. 2022. "PKS Blak-Blakan Soal Alotnya Pengganti Wakil Wali Kota Bandung", available from; (<https://www.liputan6.com/news/read/4889109/PKS-blak-blakan-soal-alotnya-pengganti-Wakil-wali-kota-Bandung>). diakses tanggal 27 Oktober 2024
- Andi Ahmad S. 2024. "Deretan Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi Sepanjang 2024". Suara.com. Diakses dari; (<https://www.suara.com/news/2024/12/24/070500/deretan-kepala-daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-sepanjang-2024>). diakses tanggal 8 Januari 2025
- Wanda Novi. JabarEkspres.com. 2022. "Kursi Wakil Wali Kota Bandung Dipastikan Kosong, Begini Kata Pengamat". available from; (<https://jabarekspres.com/berita/2022/03/25/kursi-wakil-wali-kota-bandung-dipastikan-kosong-begini-kata-pengamat>), diakses 27 Oktober 2024